

# LAPORAN PERTEMUAN FORUM KEPALA BAPPEDA PROVINSI SE-KTI XIII

JAKARTA, 5 OKTOBER 2018

“Penentuan Sektor Strategis  
di Kawasan Timur Indonesia  
dalam RPJMN 2020-2024”

## **Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI XIII “Penentuan Sektor Strategis di Kawasan Timur Indonesia dalam RPJMN 2020-2024”**

Pada tanggal 5 Oktober 2018 bertempat di Atlet Century Park Hotel Jakarta, dilaksanakan pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se-Kawasan Timur Indonesia (KTI) XIII. Kegiatan ini difasilitasi oleh Forum Kawasan Timur Indonesia dan Yayasan BaKTI, dan didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) dengan mengangkat tema “Penentuan Sektor Strategis bagi Kawasan Timur Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2020-2024”.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI dilakukan secara rutin untuk mengedepankan isu-isu pembangunan di KTI untuk menjadi perhatian dalam cakupan nasional. Dalam kerangka pijak tersebut, Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI kali ini ditujukan untuk memperluas jangkauan partisipasi KTI dalam proses teknokratik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI XIII dalam pelaksanaannya menghadirkan perwakilan dari Bappeda Provinsi NTB, Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara; Menteri PPN/Kepala Bappenas RI sebagai keynote speaker; Deputy Bidang Pengembangan Regional Bappenas yang diwakili oleh Direktur Tata Ruang, dan Pertanahan; Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur dan Team Leader Knowledge Sector Initiative (KSI). Selain itu, beberapa perwakilan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan – Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) memaparkan perkembangan dan pentingnya Analisis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Pertemuan sehari ini juga dirangkaikan dengan makan siang bersama Deputy Head of Mission, Australian Embassy in Jakarta, *His Excellency* Mr. Allaster Cox di tempat pelaksanaan kegiatan.

Acara yang berlangsung mulai pukul 9 pagi itu diawali dengan sambutan dari Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI. Dalam sambutannya, Bapak Yusran Laitupa menyampaikan apresiasinya kepada KSI dan Kepala Bappeda Provinsi atas dukungannya dalam pelaksanaan Forum Kepala Bappeda Provinsi XIII serta kepada BAPPENAS yang senantiasa memberikan dukungan kepada forum ini.

Dalam sambutannya, Team Leader Knowledge Sector Initiative, Petrarca Karetji menyampaikan bahwa Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI masih membawa semangat yang sama semenjak 12 tahun lalu, dimana beliau pertama kali berpartisipasi. Pada saat itu, diskusi Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI diarahkan pada pentingnya membangun kepercayaan atau keyakinan sosial terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut masih relevan dengan situasi hari ini, dimana *social trust* dalam proses perencanaan dalam pembangunan masih melekat. Selain itu, kebijakan yang dikembangkan menjadi begitu penting untuk berbasis pada bukti dan pengetahuan yang kuat. Tantangan dalam pembangunan semakin membutuhkan dan mensyaratkan adanya logistik kajian yang kuat di tingkat daerah. Untuk itu, kehadiran dan semakin kuatnya eksistensi Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI hari ini bisa dilihat sebagai peluang pada pentingnya integrasi penelitian dan hasil kajian dalam proses penyusunan kebijakan, demi harapan bersama membangun daerah, KTI dan Indonesia.

Ketua Pokja Forum KTI/Koordinator Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI, Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS memberikan sambutan dan secara resmi membuka pertemuan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI merupakan forum yang berkelanjutan dan eksis hingga saat ini. Forum ini senantiasa aktif mempresentasikan pentingnya penyusunan kebijakan berdasarkan pengetahuan, dan kepentingan strategis untuk pembangunan masing-masing provinsi di payung besar Forum KTI.

Lebih lanjut, Prof. Winarni mengatakan bahwa proses teknokratik untuk penyusunan RPJMN periode 2020-2024 telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Proses ini lebih mengandalkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam formulasi perencanaan pembangunan yang secara institusional dilakukan oleh Bappenas, sebagai lembaga negara yang mempunyai otoritas dan kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan lingkup nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas bertugas menyusun RPJMN dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi Misi Presiden/Wakil Presiden terpilih. Sebagai langkah awal, Bappenas sedang melakukan penyusunan *background study* melalui proses teknokratik sebelum dikembangkan menjadi konsep awal RPJMN. *Background study* ini diharapkan menjadi acuan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden berikutnya untuk dapat digunakan sebagai pijakan awal dalam pengembangan visi dan misi pemerintahan selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Prof. Winarni menyampaikan bahwa penting bagi perwakilan dan Kepala Bappeda Provinsi se-KTI yang hadir untuk selain mengidentifikasi capaian dan isu pembangunan di provinsi masing-masing, juga untuk mengedepankan kerangka pembangunan dalam perspektif dan konsepsi kewilayahan Kawasan Timur Indonesia yang akan membawa wawasan dan kepentingan pembangunan nasional dalam kontribusi keseluruhan.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI XIII bertujuan untuk; 1) Memperoleh informasi mengenai proses, cakupan dan arah *background study* RPJMN 2020-2024, 2) Mengidentifikasi sektor dan isu-isu strategis, serta masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masing-masing provinsi KTI; 3) Mengungkapkan capaian kinerja pembangunan yang menonjol di masing-masing provinsi KTI.

Setelah proses pembukaan, hadir memberikan *Keynote Speech* adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang menyampaikan rasa duka cita yang mendalam pada musibah bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Dalam pidato kunci beliau, Menteri PPN / Kepala BAPPENAS menyampaikan perkembangan yang terjadi dewasa ini, sudah tidak bisa dipungkiri bahwa di negara kita sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh kerawanan bencana alam besar. Gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi kerap terjadi, maka perlu adanya penyesuaian perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing, termasuk 12 provinsi KTI. Penyesuaian tersebut adalah penerapan perspektif dan paradigma kebencanaan dalam perencanaan pembangunan, dengan menitikberatkan pada pengurangan potensi dampak bencana. Bencana tidak dapat ditunda atau dihalau, namun kita mampu mengurangi jumlah resiko korban manusia, maupun kerusakan fisik.

Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dengan mengedepankan sektor kelestarian lingkungan dan mitigasi dampak bencana dapat menjadi salah satu cara dalam penerapan perspektif kebencanaan. Sebagai contoh adalah Kota Maumere di Kabupaten Sikka, NTT, yang mana pernah dihantam tsunami pada tahun 1990an, yang berdampak besar dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Setelah itu, Kabupaten tersebut mengembangkan budidaya mangrove di daerah mereka, yang merupakan pertahanan alami menghadapi tsunami yang tentunya tidak bisa diprediksi kejadiannya. Selain itu, kedepannya perlu dipahami bahwa pemanfaatan ruang perlu dikoneksikan dengan peta potensi kebencanaan dan perencanaan pembangunan. Sinkronisasi ini akan membangun rekomendasi dalam pemetaan potensi dan kerawanan bencana sehingga kejadian ulang seperti yang terjadi di Palu bisa terhindarkan.

Salah satu isu strategis menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas yang berkaitan dengan Kawasan Timur Indonesia dalam hal penyusunan RPJMN adalah isu kewilayahan. Isu ini berkaitan dengan ketimpangan antar wilayah, dimana wilayah Barat sangat dominan, infrastruktur seperti jalan dan jembatan pembangunannya lebih besar dibandingkan wilayah Timur. Kemudian, terkait pertumbuhan wilayah, perlu untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di KTI; bukan hanya di Pulau Sulawesi saja, dimana pertumbuhan baru seperti Mamminasata dan Manado-Bitung telah berkembang, tetapi perlu dikembangkan hingga Maluku, NTT, dan juga Papua. Diakhir pidato kuncinya, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengemukakan bahwa kedua hal tersebut merupakan sasaran strategis yang perlu menjadi perhatian bagi para penyusun dan perencana kebijakan di wilayah KTI yang akan berkontribusi pula pada percepatan pembangunan dalam konteks nasional.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Ir. Bambang Prijambodo, MA dalam pemaparannya pada topik “Visi Indonesia 2025: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024” mengemukakan bahwa tentunya RPJMN yang akan disusun untuk periode tahun 2020-2024 akan mengacu kepada pembangunan jangka panjang. Perlu ditekankan bahwa Indonesia mempunyai visi jangka panjang 20 tahun yang saat ini masih berlaku sampai 2025, yaitu Visi Indonesia 2025 yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu dikaji sasaran pokok yang diharapkan dari RPJMN yang akan disusun dalam menyongsong visi 2025. Sasaran tersebut yang telah ditetapkan melalui tiga butir pokok, yaitu percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan penekanan pada tiga hal; 1) perekonomian yang kokoh; 2) keunggulan kompetitif wilayah; dan 3) SDM yang berkualitas.

Dalam pemaparan selanjutnya, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN, Uke Muhammad Hussein, S.Si, MPP mengemukakan tiga hal yang relevan dalam konteks pembangunan KTI, dimana keunggulan kompetitif wilayah bukan lagi dalam kerangka korporatif, tetapi menyoroti keunggulan komoditas yang dimiliki oleh wilayah. SDM yang berkualitas tentunya akan berkontribusi pada produktifnya suatu wilayah. Kondisi ini kemudian harus didukung oleh struktur ekonomi yang kokoh, dan perlu dibangun dari pemerintah pusat.

Pada sesi diskusi dan *sharing* informasi, para peserta Forum; perwakilan Bappeda provinsi KTI yang hadir memaparkan perkembangan akselerasi pembangunan, isu-isu strategis dan kinerja pembangunan yang menonjol di daerah masing-masing, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan masukan untuk masalah, isu strategis, dan capaian pembangunan yang terangkum dalam Matriks Provinsi. Matriks Provinsi merupakan input dari daerah untuk penyusunan *background study* Buku III RPJMN.

## Cakupan dan Arah *Background Study* RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahap akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007). Tahap ini menjadi sangat strategis mengingat RPJMN merupakan tahap terakhir dalam RPJPN, dan diharapkan target-target pembangunan jangka panjang dapat dituntaskan.

Mengacu pada visi RPJPN, di akhir RPJMN ini diharapkan kita mampu menjadi bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan delapan misi pembangunan yang mencakup (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing, (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, (4) Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu, (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional, dan (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia International.

RPJMN IV ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan nasional lima tahun mendatang dihadapkan pada berbagai isu strategis yang perlu diantisipasi bersama. Di bidang ekonomi, transformasi struktural belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, diindikasikan dengan adanya *premature deindustrialisation*. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami stagnasi yang tidak bergerak dari angka 5-6 persen sejak awal tahun 2000an. Ekonomi kita juga terus mengalami defisit transaksi berjalan sejak 2011.

Di bidang kependudukan, bonus demografi paling tinggi diperoleh pada periode tahun 2020-2024. Dengan kata lain, periode RPJMN IV adalah kunci pemanfaatan bonus demografi. Penduduk usia produktif Indonesia mencapai 174-180 juta orang pada 2020-2024, adalah yang terbanyak di wilayah Asia Tenggara. Optimalisasi bonus demografi perlu dilakukan melalui pembangunan manusia yang holistik dan terintegrasi.

Dalam hal pengentasan kemiskinan, Pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan hingga satu digit, menjadi 9.8% per Maret 2018. Namun demikian, masih terdapat penduduk yang sangat miskin yaitu sebanyak 9.8 juta orang (3,77 %). Perlu menjadi catatan bersama bahwa *extreme poverty* di atas angka nasional paling besar terdapat di provinsi-provinsi wilayah timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, dan NTB.

Di bidang infrastruktur, masih terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian serius, yang dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok besar yaitu (i) infrastruktur pelayanan dasar yang belum memadai, (ii) infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi yang belum optimal, (iii) infrastruktur perkotaan yang belum memadai, serta (iv) energi, ketenagalistrikan dan TIK yang belum memadai.

Di bidang kewilayahan, ketimpangan wilayah masih mewarnai lansekap ekonomi Indonesia. Pusat pertumbuhan wilayah yang ada juga belum optimal dalam mendorong perekonomian nasional. Di samping itu, urbanisasi berlangsung secara masif dan belum terkelola secara baik. Pemanfaatan ruang belum terkendalikan dengan baik sehingga masih sering terjadi konflik pemanfaatan ruang dan bencana yang disebabkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak terkendalikan (*man-made disaster*). Di samping itu, pelayanan dasar masih belum terpenuhi dengan baik dan daya saing daerah juga masih rendah.

Isu strategis lingkungan hidup adalah peningkatan potensi bahaya perubahan iklim berupa bahaya kekeringan, abrasi pantai, dan peningkatan tinggi gelombang ekstrem. Di samping itu, daya dukung dan daya tampung SDA dan lingkungan hidup telah mendekati ambang batas kritis, yang mengancam kualitas air, lahan, dan keanekaragaman hayati kita. Di bidang kehutanan, pada tahun 2016, tercatat kawasan hutan Indonesia mencapai 120 juta ha, namun demikian dari luas tersebut, 32 juta ha kawasan hutan sudah tidak berhutan dan pada 14,5 juta ha kawasan hutan terdapat konflik tenurial.

Kondisi sumber daya air kita perlu mendapat perhatian serius. Meskipun secara nasional mengalami surplus kuantitas air dimana ketersediaan air kita masih lebih banyak daripada kebutuhan air, namun pada beberapa pulau telah terjadi defisit air, seperti di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Seiring dengan bertambahnya penduduk, defisit ini akan semakin tinggi apabila tidak ada upaya konservasi sumber daya air yang jelas dan terukur.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan yang telah diuraikan di atas, serta memperhatikan arahan RPJPN untuk RPJMN 2020-2024, Bappenas kemudian merumuskan tema rancangan teknokratik RPJMN ke depan yaitu: “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.”

Berpenghasilan menengah-tinggi diterjemahkan melalui transformasi struktural, produktivitas tenaga kerja yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, serta GNI per kapita yang mencapai USD 3.896 – USD 12.055. Adapun sejahtera diartikan dengan kondisi kualitas hidup yang meningkat, perilaku disiplin dan beradab, SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan indeks kebahagiaan yang meningkat. Adil dimaknai dengan ketimpangan yang menurun serta mekanisme redistribusi yang berjalan dengan baik. Selanjutnya, berkesinambungan diukur dengan daya dukung dan daya tampung yang terjaga.

## Masalah dan Isu Strategis Provinsi di KTI

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
Papua Barat	Pembangunan Manusia	Rendahnya rata-rata lama sekolah 7,06 pada tahun 2016	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pendidikan melalui peran koordinasi, pembinaan, & pengawasan dari Pemerintah Prov. Papua Barat	IPM mencapai 65,95 Rata-rata lama sekolah 8,5 tahun
		Masih terdapat 5,86% penduduk usia 15 tahun ke atas belum bisa membaca dan menulis	Peningkatan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah	Rasio Gini 0,35
		Rendahnya APM (SD = 92,9%; SMP = 68,29%; SMA = 62,40% dan PT = 20,55%)	Peningkatan kualitas tenaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan	
		Tingginya angka putus sekolah (54% pada tahun 2016)	Peningkatan kualitas substansi dan metode pembelajaran pada semua jenjang pendidikan	
		Keterbatasan akses pelayanan kesehatan yang bermutu	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pelayanan kesehatan melalui peran koordinasi, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Prov. Papua Barat	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas terakreditasi mencapai 100%
			Meningkatkan kualitas sarpras serta tata kelola layanan kesehatan khususnya RSUD rujukan Provinsi	Prosentase penduduk menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 100 %
		Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan berkualitas dan tenaga kesehatan spesialis	Meningkatkan sarpras serta sumber daya tenaga medis dan tenaga kesehatan Provinsi	Tersedianya tenaga medis yang cukup dan merata di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
			Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan mencapai 20
		Tingginya angka kematian bayi dan kematian usia produktif	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup mencapai 23
			Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, serta peningkatan kondisi kesehatan lingkungan	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup mencapai 16
			Peningkatan kualitas sarpras dan tatakelola layanan kesehatan Puskesmas	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita mencapai 4
			Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan di tingkat Kab/Kota	
	<b>Pembangunan Ekonomi</b>	Tingginya angka kemiskinan (23,12% pada tahun 2017)		Tingkat kemiskinan 20,93%
		Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah (70.05% pada tahun 2017)	Peningkatan kapasitas tenaga kerja	Laju Pertumbuhan ekonomi mencapai 7 %
		Rendahnya kapasitas SDM tenaga kerja		Tingkat Pengangguran terbuka 5,69 %
		Kurangnya investasi di daerah	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan & jembatan yg menghubungkan wilayah-wilayah ekonomi potensial dan membuka interkoneksi wilayah terisolir	Laju Inflasi Tahunan 3,71 %
			Peningkatan daya saing dan iklim investasi daerah	Pengeluaran per Kapita per bulan Rp. 1,6 juta

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
			Peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Produktivitas total daerah Rp. 180 juta
		Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan destinasi pariwisata dan promosi pariwisata	Peningkatan nilai perdagangan provinsi dan pengawasan distribusi perdagangan	
			Peningkatan daya saing pariwisata provinsi	Jumlah wisatawan (manca negara 70.000 jiwa; nusantara 50.000 jiwa)
			Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Kepariwisata	
		Rendahnya NTP Petani	Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat provinsi yang berbasis penganeekaragaman komoditas pangan lokal	
		Kurangnya infrastruktur pendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk pertanian.	Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, serta fasilitasi pemasaran	Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa mencapai 33,70 km
			Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa mencapai 100%
				Pengembangan pelabuhan perikanan mencapai 12 kawasan
				Meningkatkan ketaatan pelaku perikanan mencapai 100%
		Kurangnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi komoditi unggulan	Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
			Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	
	<b>Pembangunan (Prasarana) Wilayah</b>	Tingkat aksesibilitas antar wilayah yang masih rendah (mencapai 42,15%)	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah ekonomi potensial dan membuka interkoneksi wilayah terisolir	Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson 0.39
			Dukungan fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur kawasan-kawasan pengembangan ekonomi khusus	
			Peningkatan penyediaan sarpras pelayanan transportasi darat, laut dan udara	
		Kurangnya sarana dan prasarana permukiman, air bersih & sanitasi layak	Percepatan pembangunan sanitasi yang memadai	Akses sanitasi layak 36,10 %
			Percepatan penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat	Akses air minum 36,10 %
			Penataan permukiman kumuh	Pemukiman kumuh 0 ha
		Rendahnya tingkat elektrifikasi	Meningkatkan elektrifikasi daerah	Rasio elektrifikasi 88,40 %
			Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah	Akses penerangan 88,40 %
		<b>Pembangunan Lingkungan</b>	Banyaknya alih fungsi lahan dan pembukaan lahan	Peningkatan monitoring kualitas lingkungan

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
			Pengembangan penataan ruang yang berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam	Emisi gas rumah kaca 5%
			Meningkatkan SDM bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya alam	Tambahan rehabilitasi hutan 2.696 Ha
			Peningkatan pengelolaan & pengawasan kawasan hutan	
			Meningkatkan konservasi sumber daya alam	Peningkatan luas kawasan konservasi laut mencapai 1,14 juta ha
	<b>Pembangunan kelembagaan dan Tata Kelola</b>	Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur	Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2, S3 mencapai 60 %
				Rata-rata Nasional WTP Pemda Kabupaten 100 %
		Masih ada permasalahan terkait Tapal Batas Wilayah	Percepatan penyelesaian konflik batas wilayah antar provinsi dan antar kab/kota	Terselesaikannya seluruh konflik batas wilayah di Provinsi Papua Barat
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>Pembangunan Manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB masih rendah</b>		IPM NTB Mendekati IPM Rata-rata Nasional
		Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan Belum Optimal	1. Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Menengah	
		a. Rata-rata lama sekolah masih rendah	2. Peningkatan dan pemerataan pendidikan masyarakat pendidikan informal dan non formal	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		b. Masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi	3. Peningkatan implementasi hasil pengembangan IPTEK dalam pembangunan	
		c. Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri belum sesuai	4. Peningkatan kualitas data dan tingkat literasi masyarakat	
		d. Relatif rendahnya nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG, mutu lulusan melalui nilai UN	5. Peningkatan mutu dan daya saing	
		e. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah	6. Peningkatan pembinaan olah raga prestasi	
		f. Cukup tingginya angka buta huruf dewasa		
		g. Akses Pendidikan yang belum merata		
		h. Fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah		
		<b>Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah</b>		Usia Harapan Hidup Penduduk NTB sama dengan rata-rata Nasional
		a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah	1. Peningkatan Akses dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang bermutu dan terstandar	
		b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi	2. Peningkatan ketersediaan Obat	
		c. Tingginya prevalensi kurang gizi dan stunting	3. Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat	
		d. Belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		e. Belum meratanya SDM kesehatan antar daerah	5. Peningkatan pencegahan, pelayanan dan penanggulangan penyakit menular dan Tidak Menular	
		f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal	6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak	
		g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal	7. Peningkatkan pendidikan keterbukaan informasi kesehatan reproduksi bagi remaja	
		h. Masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan <21 tahun	8. Pendewasaan Usia Kawin Pertama Perempuan	
		<b>Angka Kemiskinan Masih Tinggi</b>		Angka Kemiskinan NTB menjadi satu Digit
		Tingkat Kemiskinan masih di atas rata-rata nasional		
		a. Kedalaman kemiskinan masih relatif tinggi	1. Mengendalikan dan mengawasi komoditas penyumbang inflasi	
		b. Angka Setengah Pengangguran yang cukup tinggi	2. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	
		c. Koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan belum optimal	3. Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	
		d. Kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja memiliki pendidikan, keterampilan, serta sikap mental relatif rendah	4. Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak	
		e. Belum meratanya masyarakat miskin mendapatkan jaminan sosial	5. Peningkatan distribusi dan kewaspadaan pangan	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		f. Infrastruktur dasar masih terbatas (akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan rumah layak huni)	6. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
		g. Masih ada desa yang masuk dalam kategori rawan pangan	7. Peningkatan kesempatan kerja	
			8. Peningkatan kualitas data dan informasi serta kelembagaan penanggulangan kemiskinan	
			9. Peningkatan kualitas hidup perempuan	
			10. Peningkatan nilai ekspor daerah yang berorientasi penciptaan nilai tambah	
			11. Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja	
			12. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	
			13. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan penguatan kelembagaan tenaga kerja	
			14. Penyediaan Infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin (air bersih, sanitasi, listrik, dan rumah layak huni)	
			15. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman	
			16. Perluasan pelayanan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
	<b>Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan</b>		Pertumbuhan Ekonomi 5,5-6,5 Persen
		a. Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal	1. Optimalisasi Koperasi dan KUKM serta industri kreatif	
		b. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan	2. kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	
		c. Masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor	3. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan pananaman modal dan perizinan yang berfokus kepada peningkatan nilai investasi daerah	
		d. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata	4. Peningkatan Pembangunan yang berkeadilan antar kabupaten kota	
		e. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat	5. Peningkatan peran BUMDes dalam menggerakkan perekonomian masyarakat	
		f. Masih minimnya akses masyarakat terhadap produk dan pendidikan keuangan	6. Peningkatan tata kelola BUMD	
		g. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah	7. Pengembangan dan pemasaran pariwisata	
		h. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang	8. Pelestarian nilai-nilai budaya yang Potensial dan mendukung pembangunan kepariwisataan	
		i. Terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan	9. Pengembangan pengelolaan dan budidaya perikanan	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		j. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal	10. Peningkatan kuantitas dan kualitas atraksi pariwisata dalam rangkaian festival	
		k. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal	11. Peningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian	
			12. Peningkatkan produksi dan pengelolaan hasil peternakan	
		<b>Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal</b>		
		Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal	Hilirisasi produk perindustrian	
		Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal	Peningkatan pengembangan pusat bisnis	
		Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal	Pengkajian dan penerapan teknologi permesinan, teknologi pengolahan pangan, teknologi digital dan industri kreatif, teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan	
		Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang	Peningkatan produksi dan diversifikasi	
		Fasilitas dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal		
		Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal		
	<b>Pembangunan (Prasarana) Wilayah</b>	<b>Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan infrastruktur wilayah belum optimal</b>		Tingkat kemantapan Infrastruktur 90%

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	
		Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku	
		Aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian	
		Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata	Peningkatan ketersediaan dan keterpaduan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh	
		Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal	Peningkatan ketersediaan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	
		Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata	Peningkatan kualitas perhubungan antar wilayah yang berkualitas	
		Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi	Peningkatan Pembangunan infrastruktur di kawasan strategis	
			Pembangunan dan Penyediaan energi terbarukan	
	<b>Pembangunan Lingkungan</b>	<b>Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal</b>		Peningkatan nilai IKLH setiap tahunnya meningkat. 56,99 di Tahun 2017 menjadi 57,59 di Tahun 2024
		Indeks kualitas lingkungan hidup cenderung semakin menurun	Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk meningkatkan kuantitas	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
			tutupan lahan	
		Penanganan sampah dan limbah belum optimal, terutama pada pengurangan sampah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Pengelolaan Hutan dan Lingkungan yang kolaboratif dan partisipatif	
		Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut	Penegakan hukum yang berkeadilan	
		Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (illegal logging, illegal fishing, illegal mining) masih belum optimal	Pengembangan desa wisata yang produktif dan ramah lingkungan dengan basis desa sekitar hutan dan desa pesisir	
		Tingkat ketaatan para pihak terhadap dokumen lingkungan cenderung rendah	Pengembangan kawasan berbasis adaptasi dan mitigasi iklim	
			Pengawasan intensif terhadap ketaatan para pihak terhadap dokumen lingkungan	
			Pembangunan pola perlindungan hutan dan lingkungan berbasis masyarakat sekitar hutan	
			Kemitraan pengelolaan hutan dan lingkungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	
			Peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan ukur dan uji kualitas hutan dan lingkungan	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
	<b>Pembangunan Kelembagaan dan Tata Kelola</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal</b>		Indeks Reformasi Birokrasi menjadi BB
		Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	
		Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	Penataan Sistem Manajemen SDM	
		Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal	Penguatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah	
		Masih relatif rendahnya indeks kepuasan masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya perencana	
		Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik	Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	
		Penerapan Good Governance yang didukung teknologi informasi belum optimal	Peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan TI	
		Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	
		Belum optimalnya proses fasilitasi pengurusan perizinan	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran	
			Peningkatan standarisasi Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik	
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
			Penyediaan arsip daerah yang berkualitas	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<b>Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal</b>		
		Pembangunan manusia berbasis gender masih di bawah nilai capaian nasional	Peningkatan Pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan	
		Peran serta perempuan dalam politik dan ekonomi masih relatif rendah	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	
		Kekerasan kepada perempuan dan anak masih cukup banyak	Perkuat kelembagaan PUG dan Anak melalui keserasian kebijakan pembangunan	
		<b>Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal.</b>		
		Indeks Demokrasi masih rendah	Penanganan pelanggar produk hukum daerah melalui tindakan preventif dan represif	
		Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial	Penguatan kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan masyarakat	
		Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplemetasikan dalam kehidupan secara optimal		
		Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi		
		Potensi bencana relatif tinggi		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
SULAWESI BARAT	Pembangunan Manusia	<b>Indeks pembangunan Manusia Sulawesi Barat masih berada pada kategori sedang yaitu 64,30 di bawah rata-rata Nasional sebesar 70,81 pada tahun 2017</b>		
		Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat masih rendah berada di bawah angka nasional sebesar 7,3 tahun dan nasional sebesar 8,1 tahun.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter.	Target IPM Tahun 2017-2022 sebesar: (2017: 64,30) (2018: 66,62) (2019: 67,64) (2020: 68,95) (2021: 69,68) (2022: 70,53)
		Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SMA masih sangat kurang sebesar 67,23 persen pada tahun 2017.	Perlunya meningkatkan derajat pendidikan melalui peningkatan daya serap sekolah terutama pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA).	Rata-rata lama sekolah di Sulawesi barat tahun 2017-2022 sebesar: (2017: 7,31) (2018: 7,42) (2019: 7,63) (2020: 7,75) (2021: 7,82) (2022: 7,96)
		Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas belum maksimal.	Perbaikan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kualitas guru.	Angka partisipasi sekolah jenjang SMA (tahun) sebesar: (2017: 67,23) (2018: 67,30) (2019: 72,01) (2020: 77,05) (2021: 82,45) (2022: 82,45)
		Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas.	Perlunya peningkatan derajat kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan (air bersih dan santasi), dan perilaku kesehatan.	Angka Harapan hidup Sulbar: (2017: 64,34) (2018: 65,59) (2019: 66,633) (2020: 66,97) (2021: 67,31) (2022: 67,55).
		Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal.	Peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana kesehatan.	Kasus Kematian ibu di Sulbar: (2017: 39 dari target 47) (2018: 42) (2019: 37) (2020: 32) (2021: 27) (2022: 22). Kasus kematian bayi di Sulbar: (2017: 208 dari target 379) (2018: 337) (2019: 316) (2020: 257) (2021: 198)

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
				(2022: 148).
		Masih rendahnya angka harapan hidup di Sulawesi Barat yang berada dibawah nasional sebesar 64,34 tahun dan nasional sebesar 71,06 tahun.		Akreditasi Puskesmas: (2017: 1) (2018: 14) (2019: 10) (2020: 10) (2021: 10) (2022: 10). Total target 55 Puskesmas. Akreditasi Rumah Sakit (2017: 2) (2018: 1) (2019: 1) (2020: 1) (2021: 1) (2022: 1). Total 7 Rumah Sakit.
		Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi di Sulawesi Barat, terdapat 39 kasus kematian ibu dan bayi sebesar 208 kasus pada tahun 2017.		Stunting Sulawesi Barat (2017: 40,0) (2018: 38,7) (2019: 37,7) (2020: 36,7) (2021: 35,7) (2022: 34,7).
		Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas masih rendah, akreditasi puskesmas sebesar 1 dari 95, akreditasi Rumah Sakit sebesar 2 dari 7 Rumah Sakit.		Penduduk yang mejadi peserta jaminan kesehatan. (2017: 67,27) (2018: 80,0) (2019: 100) (2020: 100) (2021: 100) (2022: 100).
		Tingginya permasalahan angka stunting di Sulawesi Barat.		Cakupan sanitasi layak: (2017: 59,55) (2018: 66,89) (2019: 74,46) (2020: 83,07) (2021: 92,55) (2022: 100).
		Masih kurangnya jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan.		Tenaga Kesehatan, Dokter Umum: (2017: 164) (2018: 174) (2019: 184) (2020: 194) (2021: 204) (2022: 214).Dokter Gigi: (2017: 75) (2018: 80) (2019: 85) (2020: 90) (2021: 95) (2022: 100).Perawat: (2017: 1593) (2018: 1603) (2019: 1613) (2020: 1623) (2021: 1633) (2022: 1643).

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		Masih rendahnya akses terhadap sanitasi dan air minum yang layak. Cakupan akses sanitasi layak sebesar 59,55 persen dan akses air minum layak 75,0 persen.		
		Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan.		
	<b>Pembangunan Ekonomi</b>	Iklm investasi yang belum kondusif karena sejumlah faktor antara lain kondisi infrastruktur dasar dan regulasi terkait kemudahan berusaha.	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan berinvestasi.	Nilai investasi berskala Nasional: (2017: 288milyar) (2018: 1,8triliun) (2019: 1,8triliun) (2020: 1,8triliun) (2021: 1,8triliun) (2022: 2triliun).
		Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat konsisten selalu berada diatas angka nasional namun belum terlalu berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan perekonomian masyarakat.	Meningkatkan investasi.	Pertumbuhan ekonomi sebesar: (2017: 6,67) (2018: 7,1-7,4) (2019: 7,3-7,6) (2020: 7,8-8,1) (2021: 7,9-8,2) (2022: 8,0-8,3).
		Pendapatan perkapita masyarakat masih sangat kecil berada jauh dibawah angka nasional sebesar 29,7 juta dan nasional sebesar 51,8 juta.	Meningkatkan daya saing ekonomi lokal.	Pendapatan kapita sebesar: (2017: 29,77) (2018: 31,83) (2019: 34,05) (2020: 36,21) (2021: 38,38) (2022: 40,54).
		Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Barat cukup baik dan selalu berada dibawah angka nasional sebesar 2,45 dan nasional sebesar 5,13 pada tahun 2018, namun penduduk yang bekerja masih didominasi pekerja dengan pendidikan SLTP ke bawah sebesar 67,75 persen dan SMA sebesar 21,63 persen sedangkan untuk Diploma/Strata satu hanya sebesar 10,62 persen. Hal itu menandakan masih rendahnya kualitas tenaga kerja.	Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.	Tingkat pengangguran terbuka sebesar: (2017: 3,21) (2018: 2,45) (2019: 2,77) (2020: 2,58) (2021: 2,41) (2022: 2,23).

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		Tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat masih sangat tinggi dan berada diatas angka nasional yang sebesar 11,25 persen dan nasional sebesar 9,82 persen pada tahun 2018.	Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian serta pengembangan pariwisata.	Tingkat kemiskinan sebesar: (2017: 11,18) (2018: 11,25) (2019: 9,91) (2020: 9,62) (2021: 9,34) (2022: 9,06).
			Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Belang-Belang pada pusat kegiatan nasional MATABE ( Mamuju, Tampapadang, Belang-Belang ).	
			Pembangunan sentra-sentra industri berbasis komoditi unggulan daerah.	
	<b>Pembangunan (Prasarana) Wilayah</b>	Belum optimalnya sarana dan prasarana ( bandara dan pelabuhan ) yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.	Belum optimalnya sarana dan prasarana ( bandara dan pelabuhan ) yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.	Kondisi mantap jalan provinsi (%): (2017: 31,00) (2018: 44,95) (2019: 60,00) (2020: 74,00) (2021: 90,57) (2022: 95,20).
		Masih tingginya persentase jalan provinsi yang belum mantap.	Masih tingginya presentase jalan provinsi yang belum mantap.	Rasio elektrifikasi ( Angka Rasio ): (2017: 86 (2018: 88) (2019: 90) (2020: 92) (2021: 94) (2022: 96).
		Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi.	Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi.	Rasio rumah layak huni (%): (2017: 84,25) (2018: 87) (2019: 90) (2020: 93) (2021: 95) (2022: 97).
		Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi pemukiman ( limbah, sampah dan drainase.	Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi pemukiman ( limbah, sampah dan drainase.	Presentase daerah tertinggal (%): (2017: 80) (2018: 72) (2019: 61) (2020: 54) (2021: 46) (2022: 30).
				Rasio jaringan irigasi (%): (2017: 0,08) (2018: 0,11) (2019: 0,12)

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
				(2020: 0,15) (2021: 0,17) (2022: 0,18).
				Presentase rumah tangga bersanitasi (%): (2017: 59,55) (2018: 66,89) (2019: 74,46) (2020: 83,07) (2021: 92,55) (2022: 100).
	<b>Pembangunan Lingkungan</b>	Masih luasnya lahan kritis baik didalam maupun di luar kawasan hutan.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kajian lingkungan hidup daerah (IKLHD): (2017: 69) (2018: 70) (2019: 71) (2020: 72) (2021: 73) (2022: 75).
		Kerusakan hutan dan gangguan keamanan hutan ( illegal logging ).	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan.	Luas lahan kritis ( hektar ): (2017: 353.410) (2018: 349.725) (2019: 344.988) (2020: 340.104) (2021: 335.041) (2022: 330.768).
		Belum maksimalnya pola kemitraan pemberdayaan dengan masyarakat melalui perhutanan sosial (PS).	Mempertahankan kawasan hutan dengan luasan yang cakup dan sebaran yang proporsional.	Kerusakan kawasan hutan ( kebakaran hutan / illegal logging ) (ha): (2017: 379,77) (2018: 360,78) (2019: 342,74) (2020: 325,61) (2021: 309,33) (2022: 293,86).
		Meningkatnya pencemaran lingkungan.	Rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mendorong peningkatan daya dukung lahan, air, dan ekosistem.	
			Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah serta penerapan teknologi bersih.	
			Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
			Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.	
			Penyiapan areal untuk perhutanan sosial.	
	<b>Pembangunan Inovasi</b>	Masih kurangnya pendekatan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.	Meningkatkan dan mengembangkan budaya inovasi dalam setiap bidang pembangunan.	Peringkat daya saing daerah: (2017: 28) (2018: 27) (2019: 25) (2020: 23) (2021: 20) (2022: 18).
		Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).	Meningkatkan sistem inovasi yang berkelanjutan dan terintegrasi.	Presentase hasil kelitbangan bidang pengembangan inovasi dan penerapan IPTEK yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan.
	<b>Pembangunan kelembagaan dan Tata Kelola</b>	Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.	Indeks reformasi birokrasi: (2017: CC) (2018: B) (2019: B) (2020: B) (2021: A) (2022: A).
		Masih rendahnya penerapan sistem informasi dan teknologi.	Meningkatkan dukungan sistem data dan informasi terintegrasi menuju Good Governance.	Opini BPK: (2017: WTP) (2018: WTP) (2019: WTP) (2020: WTP) (2021: WTP) (2022: WTP).
		Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan (transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi ).	Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja aparatur sipil negara melalui diklat fungsional dan teknis.	Predikat sakip: (2017: CC) (2018: B) (2019: A) (2020: A) (2021: A) (2022: A).
			Pengembangan Sulbar Smart office.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik: (2017: 50) (2018: 65) (2019: 70) (2020: 80) (2021: 90) (2022: 100).

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
			Meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah ( SPIP ).	
			Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	
SULAWESI SELATAN	Pembangunan Manusia	Akselerasi peningkatan derajat pendidikan masyarakat belum optimal.	Mewujudkan sumber daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan pembangunan ( link and match ).	
		Akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat belum optimal.		
		Akselerasi peningkatan daya beli masyarakat belum optimal.		
	Pembangunan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi dominan melibatkan sektor jasa perkotaan dibanding sektor pertanian pedesaan yang menanggung beban tenaga kerja yang lebih besar.	Menurunkan kesenjangan antar daerah, wilayah dan kesejahteraan masyarakat.	
		Lebih cepatnya perkembangan tuntutan kebutuhan layanan publik dibanding kapasitas pelayanan publik.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung sasaran pembangunan, terkoneksi dan inklusif.	
		Pembangunan Lingkungan	Degradasi kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.	Mengelola sumber daya alam Sulawesi Selatan secara optimal yang mampu mendukung daya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup.

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
	<b>Pembangunan Inovasi</b>	Kapasitas inovasi daerah belum sepenuhnya mendukung daya saing global.	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang melayani secara efisien dan efektif.	
	<b>Pembangunan kelembagaan dan Tata Kelola</b>	Lebih cepatnya perkembangan tuntutan kebutuhan layanan publik disanding kapasitas pelayanan publik.	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang melayani secara efisien dan efektif.	

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
GORONTALO	Pembangunan Manusia	<p>Pendidikan, Pemuda dan Olahraga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun (pendidikan Menengah): Ketersediaan fasilitas, daya jangkau terhadap fasilitas, ketrjangkauan pembiayaan, kualitas layanan yang disediakan</li> <li>- Kualitas, Kompetensi dan profesionalisme Guru: banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4</li> <li>- Jumlah, penyebaran dan distribusi guru: pertumbuhan jumlah guru tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah siswa, distribusi guru yang tidak merata.</li> <li>- Peningkatan akses ke pendidikan tinggi: akses ke layanan pendidikan tinggi belum merata, bahkan ketimpangan tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kayak dan miskin tampak nyata</li> <li>- Karakter dan jati diri pemuda masih rentan terhadap pengaruh negatif globalisasi, terutama globalisasi dunia melalui teknologi informasi; keterampilan dan kecakapan hidup, serta kemandirian pemuda belum optimal; partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah; prasarana dan sarana olahraga relative terbatas; peran sentra</li> </ul>	<p>Memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh penduduk untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, pelaksanaan pendidikan menengah universal dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas proses pembelajaran diseluruh satuan pendidikan (yang didukung oleh pemantapan penjaminan mutu dan penguatan sistem penilaian pendidikan serta peningkatan mutu pendidik dan memperkuat tata kelola dan peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan agar seluruh sumber daya pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien), serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga.</p>	<p>Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka melek huruf (%) 100,00</li> <li>- Angka rata-rata lama sekolah (belajar) 7,90</li> <li>- Angka partisipasi Murni SMA/MA/SMK (%) 78</li> </ul>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>keolahragaan, seperti sekolah khusus olahraga, PPLP/PPLM, Puslatda belum optimal dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; SDM keolahragaan yang berkualitas masih terbatas; apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.</p>		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesehatan Ibu dan Anak: Angka kematian ibu cukup tinggi</li> <li>- Perbaikan gizi masyarakat: Prevalensi balita gizi kurang masih cukup tinggi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan: prevalensi penyakit menular dan tidak menular cenderung meningkat</li> <li>- Akses dan mutu pelayanan kesehatan; keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan belum optimal karena banyak puskesmas yang belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standarguideline</li> <li>- SDM kesehatan masih terbatas dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata</li> <li>- Pengembangan jaringan kesehatan: pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah</li> </ul>	<p>Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.</p>	<p>Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia harapan hidup 68</li> <li>- Angka kelahiran total (fertility rate) 2,40</li> </ul>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>Budaya dan agama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kecenderungan mulai luntarnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi; semakin turunnya minat warga masyarakat terutama generasi muda terhadap kebudayaan daerah; kurangnya informasi dan pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah daerah</li> <li>- Adanya kecenderungan mulai rendahnya komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal, makin tingginya potensi konflik akibat perbedaan agama dan etnis dampak dari kemudahan akses teknologi dan informasi, makin rendahnya karakter dan wawasan kebangsaan masyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila;</li> </ul>	<p>Mewujudkan pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan adat dan budaya</p>	<p>Jumlah pengakuan nasional terhadap 15 karya seni budaya Gorontalo</p>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
	<p><b>Pembangunan Ekonomi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari sisi ekonomi makro perekonomian daerah sangat tergantung dari ekonomi nasional dan ekonomi nasional akan terpengaruh dari kondisi perekonomian global sehingga memburuknya perekonomian global akan berpengaruh pada perekonomian nasional hingga ke daerah. Perekonomian Gorontalo terbesar dibentuk oleh sektor primer yang sangat terpengaruh oleh dampak perubahan iklim dan cuaca.</li> <li>- Adanya ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dari sisi pendapatan daerah.</li> <li>- Pendapatan daerah utamanya dari pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Masih minimnya pendapatan daerah dari potensi penerimaan dan retribusi daerah</li> <li>- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih memiliki ketergantungan yang besar dari Dana Alokasi Umum. Belum ada upaya pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang</li> </ul>	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi dan UKM pengembangan sarana distribusi barang dengan menjaga stabilitas harga Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja menajamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan didesa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal yang dialokasikan melalui bantuan langsung pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/desa serta mengupayakan peningkatan pendapatan daerah</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi 7,27%</p> <p>IPM: 69,62</p> <p>PDRB perkapita AHB (Juta Rp) 21.155.865,91</p> <p>Laju inflasi provinsi: 3,30%</p> <p>Indeks gini 0,36</p>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>memang saat ini kondisinya perlu direvitalisasi</p> <p>- Secara kuantitas belanja pemerintah daerah terus meningkat, namun tidak secara kualitas. Dari komposisi makro selama empat tahun terakhir belanja publik rata-rata mencapai 70 persen, namun kualitas belanjanya masih tergerus oleh cukup besarnya komponen belanja untuk aparatur. komposisi belanja modal selama ini hanya berkisar di kurang lebih 20 persen saja dari total APBD</p>		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan pekerja di Gorontalo masih rendah, sekitar 57,01 persen pekerja adalah tamatan pendidikan SD.</li> <li>Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan menyebabkan perusahaan/industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas</li> <li>- Industri pengolahan perikanan masih didominasi oleh industri pengolahan skala mikro kecil</li> <li>- Masih tingginya harga input seperti pakan ikan dan BBM</li> <li>- Masih terbatasnya potensi dan pasokan/supply energy</li> <li>- Belum baiknya sistem distribusi barang dan jasa serta masih terbatasnya jaringan pasar dalam dan luar negeri. Tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu, terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi, masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen, masih rendahnya</li> </ul>		<p>Peningkatan pendapatan daerah 2,99 (Rp, trilyun)</p>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk market intellegent), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal, peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kuantitas dan kualitas produksi yang dihasilkan rendah. Masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku impor, industri pengolahan yang ada belum variatif dan inovatif. Masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan industri kecil menengah di daerah dan masih rendahnya kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan</li> <li>- Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM</li> <li>- Proses perijinan masih belum efisien serta proses kerja birokrasi yang rumit karena pemegang otoritas pemberian izin berada di tangan instansi yang terpisah-pisah. Belum semuanya ditangani perizinan satu pintu; ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas; dan proses pengadaan dan perizinan lahan</li> <li>- Rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan. Teknologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produktifitas cenderung rendah</li> </ul>		<p>Nilai tukar nelayan/pembudidya (NTNP) 102,1</p>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>-Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman menyebabkan daya saing produk pertanian relatif masih rendah; terbatasnya petugas lapangan pertanian; rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi informasi pemasaran permodalan; rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani; dan masih terbatasnya RPH modern berstandar SNI</p> <p>– Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik di desa dan kawasan perdesaan; ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi; pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa</p> <p>- Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terutama padi terhadap pertumbuhan sektor pertanian cukup besar, akan tetapi peningkatan ke depan semakin lambat; lahan pertanian yang semakin terbatas dan ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang</p>	<p>Peningkatan produksi, peningkatan sarana prasaran dan distribusi</p>	<p>Nilai tukar petani (NTP) 106,40</p> <p>Presentase kontribusi sektor 14.228,39 pertanian pada PDRB (trilyun Rupiah)</p> <p>Nilai tukar petani subsektor 104,42 peternakan (NTNP)</p> <p>Jumlah desa tertinggal yang ditinggalkan 88 (desa tertinggal)</p> <p>Meningkatnya skor pola pangan 66,89 harapan (PPH) ketersediaan</p> <p>Skor pola pangan harapan 86 (konsumsi)</p>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>- Usaha perikanan cenderung stagnan karena usaha perikanan didominasi oleh nelayan kecil dan pembudidaya ikan tradisional</p>		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>-Kondisi alam menjadikan terhambatnya aksesibilitas pengembangan kepariwisataan secara merata, banyaknya potensi objek wisata yang terbesar diseluruh wilayah provinsi; rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata dimana saat ini kurang lebih 99 persen objek wisata dikelola oleh pemerintah; dan lemahnya informasi produk pariwisata yang ada secara komprehensif dan akurat</p> <p>- Kemiskinan dan pengangguran. Persentase angka kemiskinan di Gorontalo masih cukup tinggi, berada di angka 16,82 persen lebih tinggi dari persentase angka kemiskinan rata-rata nasional. Salah satunya disebabkan oleh ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat</p>	<p>Mengembangkn objek wisata dan kawasan potensial untuk pariwisata</p> <p>Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dan mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar</p>	<p>Wisatawan mancanegara 7.937 (orang)</p> <p>Wisatawan nusantara 759.023 (kunjungan)</p> <p>Presentase penduduk miskin(%) 14,69</p> <p>penduduk miskin (orang) 185.391</p> <p>tingkat pengangguran terbuka (%) 2,86</p>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
	<b>Pembangunan (Prasarana) Wilayah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi jalan/jembatan yang rusak berat dan belum terbuka masih tinggi terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi yang menjadi kewenangan provinsi</li> <li>- Menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air</li> <li>- Tingginya laju alih fungsi lahan pada sawah/irigasi teknis</li> <li>- Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dan kapasitas jalan yang signifikan</li> <li>- Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air</li> <li>- Rendahnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir, genangan dan abrasi pantai</li> <li>- Prasarana dasar kawasan pemukiman: penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk</li> <li>- Pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar</li> </ul>	<p>Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal</p> <p>Peningkatan aksesibilitas akibat ketersediaan prasarana dan sarana infrastruktur, dan kesiapan infrastruktur untuk aktivitas ekonomi dan sosial</p> <p>Peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, utilitas; penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan</p>	<p>Kondisi mantap jalan 70 provinsi (%)</p> <p>Proporsi panjang jaringan 278 jalan provinsi dalam kondisi BAIK (Km)</p> <p>Presentase cakupan akses 83,02 air minum yang layak (%)</p> <p>Presentase cakupan akses 69,41 sanitasi layak(%)</p>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makin kompleksnya permasalahan di bidang transportasi, bandara dan pelabuhan akibat bertambahnya populasi penduduk dan semakin cepatnya perpindahan serta pergerakan barang dan jasa</li> <li>- Masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi</li> <li>- Belum efisiennya angkutan dari dan ke pelabuhan, terutama pelabuhan Anggrek dan pelabuhan Tilamuta</li> <li>- Masih rendahnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang ada</li> </ul>	<p>Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi</p>	<p>Presentase penurunan luas kawasan kumuh menjadi 0</p>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
	<b>Pembangunan Lingkungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS)</li> <li>- Penurunan kualitas air permukaan</li> <li>- Kerusakan Danau Limboto</li> <li>- Penambangan emas tanpa izin (PETI)</li> <li>- Kerusakan hutan dan lahan</li> <li>- Kerusakan terumbu karang dan mangrove</li> <li>- Rendahnya tingkat ketaatan atau usaha untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan</li> <li>- Kebersihan dan kehijauan kota yang belum merata antar kabupaten/kota</li> <li>- Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup masih rendah</li> <li>- Longsor dan banjir yang hampir terjadi setiap tahun</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan disebabkan tata kelola hutan yang baik masih belum berjalan</li> <li>- Kualitas sumber daya hutan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan, konversi kawasan hutan untuk kegiatan non hutan, perambahan liar, kebakaran hutan, penebangan liar, dan penebangan hasil hutan tanpa izin</li> <li>- masih adanya kegiatan penambangan liar dan pengambilan air tanah yang tidak sesuai peruntukan.</li> </ul>	<p>Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan</p>	<p>Meningkatnya indeks 73,61 kualitas lingkungan</p> <p>Indeks resiko bencana 0,3-0,65 (kategori tinggi, &gt;0,66-1,00)</p> <p>Luas lahan kritis (Ha) 700,930</p>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
	<b>Pembangunan Inovasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terbatasnya akses dalam pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>- Masih rendahnya infrastruktur komunikasi informasi</li> <li>- Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik</li> <li>- Belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat; belum adanya regulasi daerah yang mengatur tata kelola komunikasi dan informasi yang baik dan sesuai kebutuhan</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public</li> <li>- Statistik: penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dasar dan data sektoral yang update belum optimal</li> <li>- Meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan tidak dibarengi dengan kemampuan penyediaan akibat kekurangan SDM, dan sarana prasarana yang memadai</li> </ul>	Peningkatan kpasitas layanan E-Government dan komunikasi informatika di daerah	Indeks E-Government 3,85

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
	<b>Pembangunan kelembagaan dan Tata Kelola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Birokrasi pemerintahan belum efisien dan efektif</li> <li>- Masih rendahnya integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik</li> <li>- Kapasitas kelembagaan PUG: belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG, masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi SKPD/lembaga pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah</li> <li>- Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa</li> </ul>	<p>Penguatan kapasitas pengelolaan informasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan</p> <p>Peningkatan kapasitas lembaga koordinator terkait PUG/PPRG</p> <p>Peningkatan akses layanan publik dan ekonomi masyarakat didesa</p>	<p>Indeks reformasi birokrasi BB (predikat) Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas BB kinerja pemerintah Opini laporan keuangan WTP pemerintah daerah</p> <p>Survey kepuasan masyarakat 80 indeks tata kelola pemerintahan 6,16</p>
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>Pembangunan Manusia</b>	<p><b>Masalah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Belum semua penduduk memperoleh layanan pendidikan menengah</li> <li>◆ Terdapat 14,09 % ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/berat</li> <li>◆ Minimnya jumlah guru tetap jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</li> <li>◆ Kompetensi tenaga pendidik masih rendah (60 %)</li> <li>◆ Rendahnya kearifan budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan</li> <li>◆ Rendahnya tingkat literasi Sulawesi Tenggara (Urutan 27 Nasional)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjang pendidikan yang berkualitas</li> <li>◆ Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berstandar internasional</li> <li>◆ Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada penduduk lokal untuk bekerja sebagai tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Sulawesi Tenggara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Indeks Pembangunan Manusia (72,26)</li> <li>◆ Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (9 thn)</li> <li>◆ Harapan Lama Sekolah (15 thn)</li> <li>◆ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B (80%)</li> <li>◆ Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B (80%)</li> <li>◆ Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun</li> </ul>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih tinggi (74 kasus yang dilaporkan atau 229 /100.000KH)</li> <li>◆ Angka Kematian Neonatal yang masih tinggi</li> <li>◆ Angka Kematian bayi dan Kematian balita masih tinggi dibanding dengan Angka Nasional</li> <li>◆ Prevalensi kekurangan gizi/prevalensi stunting lebih tinggi dibanding dengan angka Nasional</li> <li>◆ Angka kesembuhan penderita TB yang rendah (60% target 100%)</li> <li>◆ Penderita HIV AIDS di Sultra mencapai 998 kasus sampai dengan tahun 2017</li> <li>◆ Prevalensi penderita malaria di Sultra Tahun 2017 mencapai 0,21 per 1000 pddk</li> <li>◆ Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit</li> <li>◆ Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas kefarmasian dan alat kesehatan masih rendah</li> <li>◆ Ketersediaan SDM Kesehatan yang belum sesuai dengan standar</li> <li>◆ Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan</li> <li>◆ Masih tingginya angka kekerasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam pembangunan daerah</li> <li>◆ Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan</li> </ul>	<p>(17.000 Org)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Angka Harapan Hidup Saat Lahir (70,57 thn)</li> <li>◆ Meningkatnya persentase penduduk peserta JKN (75%)</li> <li>◆ Tingkat Pengangguran Terbuka (3,9%)</li> <li>◆ Indeks Pembangunan Gender (90,29)</li> </ul>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>terhadap perempuan dan anak.</p> <p><b>Isu Strategis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai</li> <li>◆ Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah</li> <li>◆ Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa</li> <li>◆ Penguatan pendidikan agama, pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter untuk mendukung Revolusi Mental;</li> <li>◆ Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan;</li> <li>◆ Penguatan tata kelola pendidikan</li> <li>◆ Masih terdapat jenis kearifan budaya dan tradisi lokal yang belum terdaftar ditingkat nasional</li> <li>◆ Rendahnya peran masyarakat dalam melestarikan budaya dan tradisi lokal</li> <li>◆ Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia;</li> <li>◆ Percepatan perbaikan status gizi masyarakat;</li> <li>◆ Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;</li> <li>◆ Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;</li> <li>◆ Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan</li> </ul>		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>makanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;</li> <li>◆ Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>◆ Kurangnya pemahaman, komitmen dan keterampilan para pelaku pembangunan dalam pengintegrasian perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan</li> <li>◆ Belum tersedianya data terpilah disemua bidang pembangunan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan</li> <li>◆ Belum efektifnya kelembagaan PUG/PPRG dan pemberdayaan perempuan</li> <li>◆ Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan</li> <li>◆ Belum efektifnya kelembagaan perlindungan anak.</li> <li>◆ Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan;</li> <li>◆ Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan;</li> <li>◆ Pengembangan jaminan kesehatan nasional</li> <li>◆ Peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat</li> <li>◆ Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan</li> </ul>		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan belum maksimal</li> </ul>		
	<b>Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Masalah:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Masih tingginya persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara (11,63%) yang berada di atas rata-rata nasional (9,82%)</li> <li>◆ Tingkat Ketimpangan Pengeluaran per kapita (Gini Ratio) Sulawesi Tenggara tinggi (0,404) di atas nasional (0,391)</li> <li>◆ Daya saing produktivitas tenaga kerja yang masih rendah</li> <li>◆ Tingkat pengangguran terbuka angkatan kerja muda masih tinggi</li> <li>◆ Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi</li> <li>◆ Pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang belum optimal</li> <li>◆ Pemasaran pariwisata yang belum efektif dan efisien</li> <li>◆ Belum optimalnya pengembangan SDM,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Meningkatkan pelayanan kepada swasta untuk berinvestasi melalui pemberian kemudahan perizinan dan minim retribusi</li> <li>◆ Mengembangkan keunggulan dan daya tarik wisata potensial</li> <li>◆ Mengembangkan ekonomi kreatif yang berdaya saing</li> <li>◆ Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani dan nelayan</li> <li>◆ Revitalisasi kelembagaan petani dan nelayan</li> <li>◆ Pengembangan sarana pertanian dan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Laju Pertumbuhan Ekonomi (7,1-7,3%)</li> <li>◆ Tingkat Pengangguran Terbuka (3,9%)</li> <li>◆ Persentase Penduduk Miskin (11%)</li> <li>◆ Indeks Gini (0,37)</li> <li>◆ Persentase koperasi aktif (75%)</li> <li>◆ Nilai Tukar Petani (95%)</li> <li>◆ Jumlah Wisatawan Mancanegara/Tahun (20.000 Org)</li> <li>◆ Jumlah Wisatawan Domestik/Tahun (3 Juta org)</li> </ul>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>regulasi dan kelembagaan kepariwisataan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Regulasi terkait penanaman modal saling tumpang tindih</li> <li>◆ Jalur birokrasi yang panjang</li> <li>◆ Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi &amp; UMKM</li> <li>◆ Terbatasnya akses Permodalan Koperasi &amp; UMKM</li> <li>◆ Terbatasnya akses kemitraan dan jaringan usaha Koperasi &amp; UMKM</li> <li>◆ Nilai Tukar Nelayan masih rendah</li> <li>◆ Belum terlaksananya kegiatan pengembangan usaha, diversifikasi dan investasi usaha penangkapan ikan</li> <li>◆ Belum termanfaatkannya Potensi Sumberdaya Ikan Perairan Umum Daratan</li> <li>◆ Keterbatasan tersedianya pupuk subsidi untuk pembudidaya ikan</li> <li>◆ Kurangnya ketersediaan air untuk lahan pertanian tanaman pangan</li> <li>◆ Rendahnya sarana dan prasarana produksi tanaman pangan</li> <li>◆ Kelembagaan petani masih belum optimal</li> <li>◆ Masih kurangnya penanganan penyakit pada ternak</li> <li>◆ Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan</li> <li>◆ Belum berkembangnya hutan rakyat</li> <li>◆ Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan</li> </ul>		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Belum optimalnya penanganan konservasi hutan dan lahan</li> <li>♣ Kapasitas daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) rendah</li> <li>♣ Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ul> <p><b>Isu Strategis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Tingkat Pendapatan masyarakat masih sangat rendah</li> <li>♣ Minimnya akses usaha kecil dan menengah</li> <li>♣ Meningkatkan kualitas relevansi pendidikan dan skill tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja</li> <li>♣ Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada tenaga kerja maupun perusahaan</li> <li>♣ Penggunaan tenaga kerja asing tidak sesuai dengan IMTA (Izin Memperkejakan Tenaga Asing)</li> <li>♣ Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja</li> <li>♣ Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum optimal</li> <li>♣ Konektivitas antar destinasi wisata yang belum terhubung dengan baik</li> <li>♣ Destinasi wisata belum didukung oleh tata kelola destinasi yang baik</li> </ul>		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Belum optimalnya pembentukan desa wisata &amp; kelompok sadar wisata</li> <li>✦ Belum tersusunnya profil investasi pariwisata, regulasi kemudahan investasi &amp; insentif investasi daerah</li> <li>✦ Koordinasi, sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan</li> <li>✦ Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi</li> <li>✦ Optimalisasi manajemen Koperasi &amp; UMKM</li> <li>✦ Peningkatan SDM Koperasi &amp; UMKM</li> <li>✦ Kemudahan akses Permodalan Koperasi &amp; UMKM</li> <li>✦ Rendahnya pengetahuan teknologi dan informasi bagi Koperasi &amp; UMKM</li> <li>✦ Peningkatan akses perizinan bagi UMKM</li> <li>✦ Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat</li> <li>✦ Peningkatan produksi pangan pokok</li> <li>✦ Perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat</li> <li>✦ Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan</li> </ul>		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan</li> <li>◆ Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani</li> <li>◆ Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan</li> <li>◆ Pengembangan usaha sektor pertanian dan peternakan, khususnya bagi petani kurang mampu</li> <li>◆ Penerapan teknologi di bidang pertanian dan peternak</li> <li>◆ Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pertanian dan peternakan</li> <li>◆ Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan</li> <li>◆ Pengembangan hutan rakyat</li> <li>◆ Optimalisasi konservasi hutan dan lahan</li> <li>◆ Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan</li> <li>◆ Penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan</li> </ul>		

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
	<b>Pembangunan (Prasarana) Wilayah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Terbatasnya Akses pada kawasan strategis provinsi dan pusat-pusat pertumbuhan</li> <li>✦ Kualitas jalan dalam kondisi baik baru mencapai 72%</li> <li>✦ Masih Rendahnya Titik rawan banjir dan abrasi</li> <li>✦ Indeks Kinerja Daerah irigasi baru mencapai 56%</li> <li>✦ Masih banyaknya tenaga kontruksi trampil tapi belum bersertifikat</li> <li>✦ Jumlah back log perumahan 16.040 Unit</li> <li>✦ Jumlah Rumah Tidak Layak Huni mencapai 165.098 Unit</li> <li>✦ Masih terdapat Kawasan pemukiman Kumuh 4.098,89 Ha</li> <li>✦ Belum semua keluarga memiliki Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak</li> <li>✦ Belum ditetapkannya kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan (Tata ruang)</li> <li>✦ Pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai</li> <li>✦ Capaian sanitasi 69%</li> <li>✦ Air Bersih 79%</li> <li>✦ Terbatasnya konektifitas antar wilayah</li> <li>✦ Rendahnya Keselamatan angkutan transportasi</li> <li>✦ Rasio elektrifikasi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 sebesar 74,98% masih jauh di bawah rasio elektrifikasi nasional sebesar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Pembangunan jaringan jalan dan jembatan baru dalam kawasan strategis, lintas kawasan strategis dan antar wilayah</li> <li>✦ Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan yang rusak</li> <li>✦ Mengembangkan sarana prasarana transportasi dasar</li> <li>✦ Mengembangkan sistem pelayanan prima jasa perhubungan</li> <li>✦ Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jaringan irigasi</li> <li>✦ Meningkatkan sistem pengelolaan air minum</li> <li>✦ Pemerataan akses listrik di semua wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Persentase jalan provinsi kondisi baik (85%)</li> <li>✦ Persentase jembatan provinsi kondisi baik (85%)</li> <li>✦ Jumlah Pelabuhan (20 lokasi)</li> <li>✦ Rasio irigasi (90%)</li> <li>✦ Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (75%)</li> <li>✦ Persentase penduduk berakses air minum (85%)</li> <li>✦ Luas kawasan kumuh (250 Ha)</li> <li>✦ Rasio Elektrifikasi (300,000 Kwh)</li> </ul>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<p>Tahun 2017 nasional sebesar 95,35%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio desa berlistrik Sulawesi Tenggara hingga Juli Tahun 2018 sebesar 99,4%. Perhitungan didasarkan pada 25% pemenuhan listrik desa sudah dapat dikatakan sebagai desa berlistrik</li> </ul>		
	<b>Pembangunan Inovasi</b>	<p><b>Masalah:</b></p> <p>Lemahnya kemampuan berinovasi</p> <p><b>Isu Strategis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi lembaga penelitian dan pengembangan daerah dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk pembangunan daerah</li> <li>Pengembangan inovasi daerah yang dapat mendorong daya saing produk-produk unggulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>Pengembangan hasil-hasil penelitian</li> </ul>	Persentase inovasi yang diterapkan dalam pembangunan (50%)

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
	<p><b>Pembangunan kelembagaan dan Tata Kelola</b></p>	<p><b>Masalah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>◆ Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah belum Efektif ( belum tepat ukuran dan tepat fungsi)</li> <li>◆ Penerapan standarisasi ketatalaksanaan administrasi pemerintahan belum efektif</li> <li>◆ Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik (sesuai UU No 25 /2009) masih Rendah</li> <li>◆ Masih rendahnya kapasitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>◆ Belum optimalnya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung Laporan Keuangan Secara Akrual</li> <li>◆ Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sektor Pelayanan Publik belum optimal</li> <li>◆ Belum optimal pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>◆ Pengelolaan data center belum optimal</li> </ul> <p><b>Isu Strategis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai</li> <li>◆ Optimalisasi fungsi kelembagaan perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Meningkatkan akuntabilitas keuangan perangkat daerah</li> <li>◆ Meningkatkan pengelolaan aset daerah</li> <li>◆ Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada semua perangkat daerah</li> <li>◆ Meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Penilaian Akuntabilitas Keuangan (WTP)</li> <li>◆ Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (A)</li> </ul>

PROVINSI	DIMENSI	MASALAH & ISU STRATEGIS	STRATEGI	CAPAIAN KINERJA 2020 - 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</li> <li>◆ Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur</li> <li>◆ Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>◆ Pengembangan dan penerapan e-government</li> <li>◆ Peningkatan kapasitas birokrasi</li> <li>◆ Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>◆ Pembangunan infrastruktur data center</li> <li>◆ Keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi</li> <li>◆ Sarana dan prasarana komunikasi, serta belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik</li> </ul>		

## Perspektif Pembangunan KTI untuk RPJMN 2020-2024

Abdul Madjid Sallatu – Koordinator JiKTI

Secara teoritik maupun empirik, kerangka perencanaan pembangunan nasional merupakan payung perencanaan setiap wilayah provinsi, untuk selanjutnya setiap wilayah mampu mengkerangkakan pula kontribusinya melalui perencanaan. Karena itulah sudah menjadi premis bahwa kepentingan pembangunan regional sejatinya merupakan kepentingan pembangunan nasional itu sendiri. Walaupun tentunya wawasan dasarnya tetap bisa dibedakan, yaitu bahwa pembangunan nasional akan lebih menekankan pada wawasan sektoral sedang pembangunan regional lebih mengedepankan wawasan regional atau wilayah. Sejatinya dalam kedua wawasan ini tidak ada dikotomi. Dalam arti, sudut pandang pembangunan regional atau pengembangan wilayah diletakkan di depan, kemudian tentunya akan sangat membutuhkan dukungan pembangunan sektoral.

Dalam perspektif berpikir di atas, ada dua fenomena nyata yang patut dicermati. Pertama, angka Gini Ratio yang memperlihatkan bahwa kondisinya di KTI dalam empat tahun terakhir (2015-2018) masih tinggi dan fluktuatif, bahkan sebagian berada di atas angka Gini Ratio Indonesia. Padahal di sisi lain, pertumbuhan ekonomi setiap provinsi KTI berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Itu berarti, pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat di KTI patut mendapatkan perhatian serius ke depan. Apalagi dari angka Gini Ratio terkesan bahwa peningkatan yang terjadi di KTI turut mendorong meningkatnya angka Gini Ratio nasional. Dengan demikian, penanganan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di KTI butuh upaya-upaya sistematis dan terukur.

Kedua, Asia Competitiveness Institute, National University of Singapore (ACI-NUS) belum lama ini mempublikasikan temuan awalnya tentang daya saing provinsi-provinsi di Indonesia, memperlihatkan bahwa kondisinya sangat tidak menggembirakan. Provinsi Sulawesi Selatan, yang meskipun tergolong ke dalam 10 provinsi yang tertinggi skornya (0.249), terpaut sangat jauh dengan skor DKI Jakarta (3.172) yang menduduki peringkat pertama pada tahun 2018 ini. Pada peringkat 10 terendah, terdapat enam provinsi di KTI, yaitu Papua, Sulawesi Barat, NTT, Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat. Gambaran ini memperlihatkan bahwa untuk menarik sektor swasta ikut berperan dalam pembangunan KTI masih kurang menarik. Karena itu, mau atau tidak mau, harapan besar masih harus diletakkan pada alokasi program dan penganggaran yang bersumber dari APBN. Pemihakan nyata dalam kerangka pembangunan nasional menjadi hal yang niscaya bagi pembangunan KTI untuk memburu ketertinggalannya dan memperkecil kesenjangan antar kawasan di tanah air sebagaimana selama ini.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka dengan mencermati kedua fenomena di atas, pemerataan pendapatan dan kapasitas daya saing wilayah, yang di satu pihak akan menjadi kebijakan strategis pada skala nasional, dan di lain pihak agenda strategis yang dipilih oleh masing-masing provinsi untuk diajukan ke skala nasional. Seyogyanya dapat menjadi kesepahaman bahwa kedua fenomena nyata di atas dijangkau melalui pendekatan proyek ataupun melalui kegiatan pembangunan yang bersifat teknis. Melainkan membutuhkan suatu kerangka yang bersifat konseptual, berbentuk Program Agenda Aksi.

Sejauh ini sebenarnya melalui skema program pembangunan nasional yang sejatinya diarahkan baik untuk tujuan pemerataan pendapatan maupun untuk meningkatkan daya saing wilayah sudah tersedia. Namun dengan gambaran kedua fenomena nyata di atas, sekilas dapat disimpulkan bahwa belum mampu mencapai kinerja yang optimal. Selain masih menghadapi sejumlah kendala dan hambatan dalam implementasinya. Nampaknya pengendalian dan tata kelola baik yang ditangani langsung oleh pemerintah (pusat) maupun yang berada dalam kewenangan daerah masih sangat tidak efektif. Meskipun pada akhirnya menjadi ajang saling menyalahkan di antara kedua pemangku kewenangan ini.

Dalam sejarah perkembangan pembangunan di Indonesia selama ini, harus diakui bahwa konseptualisasi dan perumusan program pembangunan pada dasarnya bisa terjustifikasi validitasnya. Tetapi pada akhirnya selalu saja kinerja yang bisa dicapai nyaris selalu kurang optimal. Hal ini mengisyaratkan bahwa di satu sisi *'planning matters'* masih melekatkan dalam rumusan perencanaan, dan di lain sisi, juga disiplin dan konsistensi dalam implementasi perencanaan masih belum bisa ditegakkan secara baik. Itu berarti, sebelum berbicara lebih banyak dan lebih jauh tentang skema perencanaan pembangunan, kiranya ada masalah manajemen perencanaan pembangunan yang perlu juga mendapatkan porsi perhatian, terutama di KTI sendiri. Pada skala provinsi, mungkin saja rentang kendali manajemen perencanaan pembangunan masih terlalu lebar. Untuk itu, sudah mendesak untuk dipikirkan tentang penguatan kelembagaan perencanaan yang ada saat ini, karena secara umum kapasitas SDM aparat yang dimiliki sudah cukup memadai.

Sejauh ini, selain masalah pemerataan pendapatan dan kapasitas daya saing wilayah, juga tetap mengemuka kepentingan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi yang tersedia pada masing-masing wilayah provinsi. Kesemuanya ini sepatutnya mampu diintegrasikan dalam suatu kerangka perencanaan, bukan seperti yang kuat terkesan sampai saat ini bahwa kesemuanya baru hadir dalam suatu penjumlahan perencanaan. Permasalahan pokok keterintegrasian tersebut akan jelas nampak bila diamati dan dipertanyakan dimana atau siapa yang menjadi *leading sector* untuk kelembagaan dan pelembagaan perencanaan pembangunannya? Pada butir ini, suka atau tidak, patut untuk dikemukakan bahwa *'institutionalization matters'*.

Kehadiran rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka tahunan, belumlah dapat dikatakan *'taken for granted'* akan mampu mencapai kinerja pembangunan sebagaimana yang diharapkan. Mungkin, walaupun naif, dapat dikatakan bahwa sejauh ini terlalu banyak yang mampu direncanakan tetapi tidak banyak hasil yang mampu diperoleh, termasuk hasil kumulatif dalam kinerja pemerataan pembangunan dan daya saing wilayah misalnya. Oleh karena itu, tantangan dan peluang dalam kerangka RPJMN 2020-2024 yang akan datang, bukan hanya terbatas pada kecermatan menemukan sektor strategis provinsi saja, melainkan juga bagaimana mengendalikan dan melakukan tata kelola pencapaian kerjanya.

Kepentingan pembangunan KTI adalah mengacu dan bertumpu pada manusia yang hidup dan berpijak di KTI. Itu berarti, yang dibutuhkan adalah kehadiran sektor strategis yang mampu secara langsung meningkatkan pendapatan nyata masyarakat di KTI, terutama pada kelompok masyarakat 40 persen terbawah dalam ukuran pendapatan pada masing-masing provinsi. Dengan demikian, hasil Susenas dalam berbagai seri dan hasil sensus pertanian 2013, sepatutnya dapat membentuk wawasan perencanaan, bagaimana mengembangkan wilayah di KTI. Dapat diduga bahwa sejumlah

unggulan baru yang akan memperkuat sektor strategis yang ingin dikembangkan akan dapat teridentifikasi secara lebih jelas.

### **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)**

Pada Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI XIII, hadir juga perwakilan dari Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (PUSAKA-LAN), yang berbagi mengenai latar belakang, konsepsi, tujuan dan kegunaan serta manfaat Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) bagi peningkatan kualitas kebijakan publik bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

### **Sosialisasi IKK oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)**

Materi tentang Kebijakan Publik disampaikan oleh Bapak Harry Supriadi (Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputy Kajian Kebijakan LAN).

Pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi—dengan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada setiap tingkatan pemerintah daerah melakukan pelayanan dasar publik dan pelayanan umum lainnya sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 dihadapkan dengan berbagai tantangan terkait dengan kelembagaan, regulasi, SDM, Prasarana dan Sarana, dan Tata Kelola—sebagai kunci utama dari berbagai masalah yang dihadapi. Kompleksitas kendala dihadapi oleh OPD teknis, dibutuhkan dukungan kebijakan yang dapat merespon kebutuhan pelayanan dasar oleh masyarakat, yang didukung dengan regulasi daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2017, terdapat lebih dari 15 ribu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pusat yang tidak relevan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang sudah berlangsung puluhan tahun. Perbaikan konkrit yang dihadapi pemerintah daerah dan pusat belum terlihat nyata. Untuk itulah, perlu dilakukan evaluasi kebijakan di daerah melalui penggunaan instrumen IKK.

Di awal sesi ini juga disampaikan perlunya IKK, antara lain: mengapa kebijakan bermasalah dijumpai di tingkat nasional dan daerah, konflik kebijakan, terjadi inkonsistensi atau tumpang tindih satu kebijakan dengan kebijakan di atasnya. Hasil evaluasi oleh Kemendagri, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dihadapkan pada beberapa masalah, inkonsistensi dalam tujuan kebijakan. Misalnya, terjadi retribusi daerah yang memberatkan usaha, mengurangi daya saing, serta kurangnya minat pelaku bisnis melakukan kegiatan di daerah, terjadi multitafsir (perbedaan perspektif), dan muncul pasal-pasal karet yang banyak dalam satu aturan, muncul rumusan kebijakan kurang jelas karena bahasanya, aturan kebijakan tidak operasional karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Selain berbagai masalah disampaikan di tingkat pusat dan daerah, ada juga kebijakan berumur pendek. Kebijakan sebagai instrumen belum memberikan arahan jelas dan detail untuk pelaksanaan program/kegiatan. Ada juga kebijakan yang dibuat dalam waktu pendek dan kemudian ditunda pelaksanaannya. Lebih fatal lagi ada kebijakan yang dibatalkan pelaksanaannya, serta terdapat orientasi kebijakan untuk kebutuhan birokrat sendiri.

Ibu Meita Ahadiyah Hartikaningsih (Kabid Seleksi dan Pengembangan Analis Kebijakan pada Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN) menjelaskan mengenai Indeks Kualitas Kebijakan.

Masalah dan tantangan dihadapi oleh Pemda dalam menghasilkan kebijakan yang baik di daerah. Pemerintah daerah perlu merespon masalah kebijakan daerah, maka untuk itu diperlukan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) untuk mengurangi kebijakan daerah yang bermasalah. Karena dengan pendekatan IKK, Pemda dengan mudah dapat melakukan evaluasi kebijakan—yang sedang dan telah dilakukan di daerah.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah sebuah alat pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan nasional untuk menyusun, menformulasikan, dan menilai pelaksanaan kebijakan, dengan memperhatikan semua indikator yang dibutuhkan untuk digunakan dalam proses dan penetapan kebijakan nasional dan daerah.

Melalui evaluasi kebijakan daerah, Pemda dengan mudah mengetahui pada bagian tahapan proses yang mana, yang perlu segera diperbaiki. Misalnya setelah ditelusuri, akan jelas dapat diketahui, apakah pada proses kebijakan yang terkait dengan perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan. Pada tahap perumusan kebijakan akan terkait dengan beberapa tindakan yang wajib dilakukan seperti: *agenda setting* dan formulasi kebijakan. Kedua tindakan tersebut masuk dalam tahapan perencanaan kebijakan. Pada sisi tahapan pelaksanaan kebijakan mencakup aspek implementasi dan evaluasi kebijakan.

Sangat diharapkan Pemda menciptakan inovasi-inovasi daerah dan dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan (*knowledge*), yang menjadi fondasi untuk kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan daerah. Hal ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan dasar publik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Tiba saatnya, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menghasilkan kebijakan-kebijakan inovatif daerah yang mengarah pada program prioritas daerah dan nasional terkait dengan pelayanan dasar publik sesuai dengan amanat Perpres No. 79 Tahun 2017. Penggunaan IKK oleh Pemda dapat berfungsi dan digunakan sebagai *Self Assessment* Pelaksanaan Kebijakan Publik Daerah.

### Tanggapan Bappeda Provinsi terkait IKK

Sering dijumpai di daerah terjadi kebijakan-kebijakan daerah yang tumpang tindih dengan kebijakan lainnya di tingkat daerah dan pada tingkat nasional, serta dampak kebijakan di daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan daerah diharapkan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar untuk merespon kebutuhan masyarakat lokal.

Karena kebijakan daerah berkontribusi langsung kepada kebutuhan masyarakat dan berkaitan dengan pelayanan dasar publik dan layanan umum daerah, diperlukan instrumen yang jelas tentang pengukuran kebijakan daerah yang baik, kebijakan tidak berbenturan dengan kebijakan Pusat dan Daerah, serta kewenangan daerah mengukur kebijakan dan implementasinya. Pemda memerlukan tenaga-tenaga analis kebijakan yang berkualitas serta harus ditegaskan tentang penting penyediaan SDM Analis Kebijakan berkualitas di daerah.

Bagaimana daerah merumuskan kebijakan khusus di daerah terkait dengan status dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dimana kedua provinsi tersebut

membutuhkan kebijakan-kebijakan perencanaan kegiatan dan perencanaan pembiayaan kegiatan yang berorientasi kontekstual Papua, menjawab kebutuhan orang Papua dan Papua Barat.

Oleh sebab itu, untuk daerah dapat menghasilkan kebijakan daerah berkualitas, IKK perlu dirumuskan dalam dokumen RPJMD dan Renstra, sebagai pijakan OPD teknis dan Bappeda Daerah melakukan kerja sama dengan LAN, untuk menghasilkan tenaga-tenaga analis kebijakan yang berkualitas. Selain perlu diperhatikan di dalam lembaga daerah seperti Biro Hukum diwajibkan memiliki SDM-SDM yang memiliki keahlian sebagai Analis Kebijakan, untuk dapat menjawab kebijakan daerah berorientasi kebutuhan masyarakat lokal serta berkualitas.

### Rekomendasi tindak lanjut Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI XIII

- ◆ Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI untuk memberi masukan bagi RPJMN 2020-2024 perlu dilakukan lagi di awal tahun 2019 mengingat waktu yang terbatas dan masukan yang belum komprehensif dari Bappeda Provinsi Se-KTI dan dari sisi regional KTI.
- ◆ Penggantian Koordinator Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Winarni Monoarfa perlu untuk segera didiskusikan dan ditindaklanjuti. Jika tidak memungkinkan untuk didiskusikan saat Festival Forum KTI VIII di Makassar, maka perlu didiskusikan saat pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI yang berikut.

### Peserta Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI XIII

No.	Nama	Jenis Kelamin	Instansi/Organisasi
1	A. Irawan Bintang	L	Bappeda SULSEL
2	Abdul Madjid Sallatu	L	JiKTI/BaKTI
3	Agit K	P	PUSAKA LAN
4	Aldhino Niki	L	PUSAKA LAN
5	Aryanto Husain	L	Bappeda Prov. Gorontalo
6	Aswi Caksana	L	Bappenas
7	Bambang P.S Brodjonegoro	L	Menteri PPN/Kepala Bappenas
8	Budhi Bahroelim	L	KSI
9	Budiati Prasetiamartati	P	KSI
10	Dheni Tjan	L	Bappeda Maluku Utara
11	Eka Paksi	L	Bappeda Prov. Sulawesi Tenggara
12	Elsa	P	Kumparan
13	H. Agussalim	L	Bappeda SULSEL
14	Hary Supriadi	L	LAN
15	Ita Masita	P	Yayasan BaKTI
16	Jemy Piagone	L	Bappeda Papua Barat
17	John Boekorsjom	L	Bappeda Papua
18	Khairul Rizal	L	Bappenas
19	Leonardo S	L	Bappenas
20	M. Fahlevy	L	Bappenas

No.	Nama	Jenis Kelamin	Instansi/Organisasi
21	Meita Ahadiyahati	P	LAN
22	Muhammad Musa'ad	L	Bappeda Papua
23	Muhammad Riadi	L	Bappeda NTB
24	Noldy Tuerah	L	JiKTI/BaKTI
25	Petrarca Karetji	L	KSI
26	Ratu Destiani	P	Bappenas
27	Ria Arief	P	DFAT
28	Ricky Toemandoek	L	Bappeda Sulut
29	Rio Abdul Fattah	L	Yayasan BaKTI
30	Syuryadi Sabirin	L	Bappeda Maluku
31	Uke Moh. Hussein	L	Bappenas
32	Winarni Monoarfa	P	Ketua Pokja Forum KTI
33	Yusran Laitupa	L	Yayasan BaKTI
34	Zusanna Gosal	P	Yayasan BaKTI

# DOKUMENTASI FOTO







